

DINAMIKA MADRASAH: POTRET LIMA TAHUN MENJADI SEKOLAH UMUM

Amien Haedari

Abstract

This paper attempts to portrait the journey of madrasah (religious school) during the last five years, i.e. since the enactment of Law of RI number 20 of 2003 regarding the National educational system which positions a madrasah as general school. This reposition is actually positive for the sustainability as well as improving the quality of madrasah. However, it should be noted that more than 90% of madrasah are managed by public. This means that madrasah still has to be developed according to the public requirements, not that of government. Thus, to create a policy on madrasah, it obviously is necessary to accomodate various public interests. Exactly, it is needed a harmonious and dynamics convergency between the government and the people.

Keywords: madrasah, public requirement, convergency

I. PENDAHULUAN

Mayoritas madrasah diselenggarakan oleh masyarakat dengan status swasta sebanyak 91,5 % berbanding dengan 8,5 % yang berstatus negeri. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah sangat besar. Namun demikian, peningkatan mutu pendidikan madrasah, pada prosesnya jelas meniscayakan adanya koordinasi yang harmonis antara masyarakat dengan Pemerintah.

Dr. H. Amien Haedari, M.Pd adalah
Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan
Keagamaan - Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama RI

Saat ini madrasah memasuki tahun kelima dalam posisinya sebagai pendidikan umum, pasca diundangkannya *Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Tepatnya, pada pasal 17 [2] dinyatakan bahwa: “Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.” Sementara pada pasal 18 [3] dinyatakan bahwa: “Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.”

Madrasah telah lahir dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, jauh sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan. Namun, posisi madrasah sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional diperoleh tidak dengan mudah, melainkan melalui perjuangan yang keras dan tidak kenal lelah dari seluruh komponen umat Islam Indonesia. Titik terang yang mencerahkan mulai tampak sejak ditetapkannya *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, dimana turunan dari UU tersebut, yaitu *PP RI No. 28 Tahun 1990*, pada bab III pasal 4 [3] menyatakan bahwa “Sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.” Selain itu, dalam *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0489/V/1992 tentang Sekolah Menengah Umum*, pada pasal 1 [6] disebutkan bahwa: “Madrasah Aliyah adalah SMU yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.”

Berdasarkan aturan perundang-undangan di atas, artinya secara normatif Pemerintah telah memberikan pengakuan terhadap pendidikan madrasah dan memposisikannya sama atau setara dengan pendidikan sekolah sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang ada.

Sebagaimana lembaga sekolah, madrasah pun berupaya melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, seperti termaktub dalam UU tersebut, yakni “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Di sisi lain, konsekuensi dari reposisi tersebut, madrasah pun harus melaksanakan sepenuhnya kurikulum sekolah umum yang telah menjadi kebijakan Departemen Pendidikan Nasional, selain tetap melaksanakan pendidikan keagamaan yang telah menjadi ciri khas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam.

II. DINAMIKA MADRASAH: PERJALANAN LIMA TAHUN

Tulisan ini akan mencoba mencermati perkembangan pendidikan madrasah selama lima tahun terakhir, dilihat dari aspek-aspek perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan manajemen dan tata kelola, berdasarkan hasil kajian dan penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan – Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

A. Perluasan dan Pemerataan Akses

Madrasah tetap mampu *survive* dalam kurun waktu yang cukup panjang, tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam memajukan lembaga pendidikan ini. Sebagai kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan madrasah sangat diharapkan untuk mampu memenuhi kebutuhan siswa terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku keagamaan dalam porsi yang memadai.

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Lembaga pendidikan pada jenjang ini berbentuk Raudlatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA) yang didirikan dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Artinya, seluruh lembaga RA/BA yang ada, 100% diselenggarakan oleh masyarakat dan tentu saja berstatus swasta. Jumlah RA/BA di seluruh Indonesia, hingga Tahun Pelajaran 2007/2008 sebanyak 18.759 buah. Tren perkembangan RA/BA pada empat tahun terakhir yaitu, tahun pelajaran 2004/2005 sampai tahun pelajaran 2007/2008. Pada tiga tahun pertama menunjukkan peningkatan, sedangkan pada tahun 2007/2008 menunjukkan penurunan. Akses masyarakat di beberapa daerah terpencil dan umumnya daerah di luar Jawa terhadap pendidikan RA/BA, terbilang masih sangat minim.

2. Madrasah Ibtidaiyah

Pada jenjang MI, sebarannya sudah mencapai seluruh propinsi di Indonesia. Pada tahun 2007, jumlah lembaga MI sebanyak 21.188 (7,4% negeri dan 92,6% swasta). Keberadaan MI terbanyak di daerah

Jawa, terutama di Jawa Timur dengan jumlah lembaga sebanyak 6,394 buah (143 MIN dan 6.251 MIS). Sedangkan sebaran paling kecil berada di Provinsi Papua, yakni hanya sebanyak 23 lembaga. Namun tren perkembangan lembaga MI dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada Tahun Pelajaran 2004/2005, jumlah MI sebanyak 23.517 buah, tahun 2005/2006 berjumlah 22,189 buah, tahun 2006/2007 berjumlah 21,189 buah dan tahun pelajaran 2007/2008 berjumlah 21,188 buah. Penurunan terjadi tidak hanya secara kelembagaan, melainkan juga dari jumlah peserta didik yang kian menurun secara signifikan.

3. *Madrasah Tsanawiyah*

Jumlah MTs terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2009, MTs berjumlah 12.883 buah, dengan rincian: 1.259 MTsN dan 11.624 MTsS. Sebaran MTs di setiap propinsi tidak sama, dan terbanyak di Jawa Timur; berjumlah 2,401 buah dengan 438,415 peserta didik. Sedangkan di Papua terhitung paling sedikit, yakni hanya memiliki MTs sebanyak 21 buah, dengan 1,478 peserta didik. Tren perkembangan lembaga dan jumlah peserta didik dalam 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Jika pada tahun pelajaran 2004/2005, hanya terdapat 12,054 lembaga dengan 2,129,564 peserta didik, maka pada tahun pelajaran 2007/2008, memiliki 12,883 lembaga, dengan 2,347,188 peserta didik.

Peningkatan tersebut membuat kontribusi MTs terhadap APK pendidikan nasional juga semakin meningkat. Sampai tahun pelajaran 2007/2008, kontribusi APK MTs mencapai 21,8%, bila dilihat dari jumlah populasi peserta didik SLTP secara keseluruhan. Hanya saja, jika dilihat dari aspek sarana prasarana, ternyata jumlah ruang kelas yang digunakan MTs sebanyak 73.556 buah, terhitung 7.578 buah dalam kondisi rusak berat dan 16.693 rusak ringan, dan kebutuhan ruang kelas baru 5.935 buah. Karena itu, di beberapa tempat, masih banyak ruang kelas yang digunakan bergantian dengan MA atau MI.

Laboratorium IPA hanya dimiliki oleh 52,63 % MTs, sementara MTs yang memiliki ruang perpustakaan standar sebanyak 21,05 %. Kepemilikan buku perpustakaan yang lengkap sesuai standar terdapat pada 3,85 % lembaga. Namun tidak ada satupun (0,00%) MTs yang memiliki peralatan multimedia yang lengkap sesuai standar.

Seperti halnya terjadi pada MI, permasalahan utama yang dihadapi MTs pada aspek perluasan dan pemerataan akses, adalah masalah

penyebaran lembaga MTs yang belum merata, terutama di daerah luar Jawa, keterbatasan ruang kelas, dan sarana prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, serta multimedia.¹

4. *Madrasah Aliyah*

Sampai tahun 2007, jumlah MA mencapai 5.398 lembaga. 644 (11,9%) berstatus negeri dan 4.754 (88.1%) berstatus swasta. Jumlah peserta didik MA sebanyak 855.553 orang, terdiri atas 307,229 (35%) berada di MA negeri dan 548.324 (64.1%) di MA swasta. Dengan demikian, maka MA dapat berkontribusi pada APK pendidikan nasional sebanyak 19,32%. Kontribusi MA pada APK nasional sangat variatif, hal ini disebabkan karena sebaran jumlah MA di setiap provinsi tidak sama. Jawa Timur tetap menjadi propinsi yang paling banyak berkontribusi jika dibandingkan dengan propinsi lainnya, sedangkan Propinsi Papua terhitung yang paling sedikit memberikan kontribusi.

Perkembangan lembaga MA dan peserta didiknya dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun pelajaran 2004/2005 jumlah lembaga MA hanya 4,687 buah dengan jumlah peserta didik sebanyak 744,736 orang, maka pada tahun pelajaran 2007/2008 jumlahnya menjadi 5,398 buah dengan jumlah peserta didik sebanyak 855,553 orang. Perkembangan tersebut menandakan bahwa akses anak usia sekolah menengah ke lembaga MA semakin banyak dan MA semakin diminati oleh masyarakat.²

5. *Drop Out Siswa*

Tingkat drop out pada MI dan MTs cukup tinggi, yaitu 1,36% dari jumlah siswa sebanyak 28.866 pada MTs dan 0,71 % dari jumlah siswa sebanyak 22,489 pada MI. Adanya siswa drop out ini tentu berpengaruh terhadap pengukuran APK dan APM kemampuan madrasah dalam menyerap peserta wajib belajar. Faktor dominan penyebab drop out siswa pada jenjang pendidikan dasar ini adalah strata sosial ekonomi orang tua siswa yang rendah, selain kesadaran sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pendidikan anak.³

¹ Departemen Agama RI. 2008. *EMIS*

² *Ibid.*

³ Lisa'diyah. 2006. *Survey Tingkat Drop Out Pendidikan Dasar di Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, h. 97

6. Aksesibilitas Masyarakat

Umumnya madrasah berada di wilayah pinggiran kota dan pedesaan. Ini dapat dipahami mengingat madrasah tumbuh dari dan atas inisiatif masyarakat, dimana akses mereka ke lembaga sekolah tidak cukup terjangkau. Karena itu, keberadaan madrasah justru lebih diminati oleh masyarakat, sehingga secara kuantitatif jumlah siswanya lebih banyak dari siswa sekolah. Pada sisi inilah madrasah mampu melayani serta memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat yang secara sosio-kultural, politik dan ekonomi tidak beruntung (*disadvantaged people*), dari sisi akses. Kelompok masyarakat inilah yang sering disebut sebagai komunitas marjinal.

Strategi perluasan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan madrasah di komunitas marjinal diorientasikan pada pemberdayaan diri (*self empowerment*) dan pelibatan masyarakat (*people engagement*). Terkait dengan kebijakan desentralisasi pendidikan, maka pendidikan madrasah di komunitas tersebut diorientasikan pada usaha melembagakan pola pengelolaan pendidikan formal berbasis sekolah (*school based management*) dan mendorong partisipasi masyarakat untuk menciptakan pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Pola pendekatan ini menekankan pengembangan madrasah pada pemberdayaan SDM, manajemen, kurikulum, jaringan dan pelibatan masyarakat secara luas.⁴

B. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing

1. Tenaga Pendidik

Jumlah guru RA tahun pelajaran 2006/2007 sebanyak 57,049 orang. 7,7 % di antaranya PNS dan 92,3 % non PNS. Guru RA yang memiliki kualifikasi pendidikan S-1 masih sangat sedikit, yaitu 6.777 orang atau 8,9%, sedangkan sisanya sebanyak 68.396 orang atau 91.1% di bawah Strata 1.

Jumlah guru pada MI pada tahun pelajaran 2007/2008 sebanyak 221,051 orang. Dari jumlah tersebut, yang memiliki kualifikasi S1 dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun pelajaran 2007/2008 jumlah guru MI yang memiliki kualifikasi sarjana sebanyak 53,500 orang atau 24,2 %. Namun demikian, jumlah guru yang belum sesuai

⁴ Badan Litbang dan Diklat. 2009. *Workshop Pengembangan Madrasah pada Daerah Marjinal*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, h. 56.

dengan kualifikasinya tetap jauh lebih banyak, yaitu 167,551 orang atau 75,8 %. Sedangkan guru MI yang telah lulus sertifikasi sangat sedikit, yaitu hanya 891.885 orang atau 5 % dari keseluruhan jumlah guru yang tersertifikasi.

Jumlah guru MTs pada tahun pelajaran 2007/2008 sebanyak 242,175 orang. Pada setiap tahunnya, guru MTs yang memenuhi kualifikasi semakin meningkat, yaitu sebanyak 141,447. Sisanya, sebanyak 42% guru belum memenuhi kualifikasi.

Jumlah tenaga pendidik pada MA sebanyak 11,410 orang. Terdapat peningkatan dari tahun ketahun jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi. Pada tahun pelajaran 2004/2005 jumlah guru yang sesuai kualifikasi berjumlah 65,073 orang dan siasanya sebanyak 25,368 orang, tidak sesuai. Sementara pada tahun pelajaran 2007/2008 yang sesuai kualifikasi sebanyak 86,525 dan yang tidak sesuai sebanyak 25,885 orang.

Peningkatan kualifikasi guru di antaranya merupakan hasil bantuan beasiswa untuk studi lanjut yang disediakan Pemerintah bagi guru-guru madrasah non sarjana. Selain tuntutan sertifikasi guru yang mensyaratkan kualifikasi tertentu sehingga memacu guru untuk memenuhi standar tersebut. Peningkatan jumlah guru yang berkualifikasi sarjana pada tiap jenjang pendidikan di madrasah, pada setiap tahunnya perlu dikembangkan dan dilanjutkan. Namun perlu keselarasan peningkatan kualifikasi jumlah guru dibandingkan peningkatan kompetensi guru.

2. *Kompetensi Guru*

Penelitian tahun 2009 yang melibatkan 593 guru MTs Mata Pelajaran Umum dari 96 MTs di 16 kabupaten dari 6 provinsi menegaskan bahwa dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, maka tingkat kompetensi profesional berada pada tingkat terendah.⁵

3. *Diklat Guru*

Penelitian tahun 2009 yang melibatkan 192 responden menjelaskan bahwa 57 % guru telah memperoleh diklat pengembangan *skills* keguruan atau diklat lainnya. Sedangkan 43 % lainnya belum memperoleh diklat pengembangan profesi guru/tenaga pendidik. Hasil temuan ini

⁵ Sumarni. 2007. *Pemetaan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Umum di Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, h. 87.

menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas mengajar.⁶

4. Pengembangan Kurikulum

Aspek kurikulum merupakan bagian penting dalam keberhasilan pendidikan di madrasah. Kurikulum yang diterapkan di RA belum memiliki standar yang berlaku secara nasional, sehingga menyulitkan para guru dalam memberikan pengajaran.

Kurikulum yang diterapkan di MI sesuai dengan kebijakan kurikulum nasional dan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), hanya saja penerapannya belum dipahami secara baik oleh seluruh guru. Penelitian tahun 2009 yang melibatkan guru mata pelajaran umum MA di 8 kota/kabupaten tentang Implementasi KTSP menegaskan bahwa wawasan yang dimiliki guru MA tentang KTSP masih terbatas. Hanya 18,75% yang dapat menjawab tes dengan skor di atas 50%, sedangkan lainnya dibawah 50%. Hal ini membuktikan sosialisasi KTSP masih sangat rendah.⁷

5. Angka Kelulusan

Angka kelulusan jenjang MI pada tahun pelajaran 2007/2008 mencapai 99%. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran di MI relatif baik. Tingkat kelulusan pada MI di setiap provinsi, rata-rata 99,23 %. Provinsi yang mencapai kelulusan 100 % adalah Maluku, sedangkan angka kelulusan terendah di Sulawesi Selatan; sebesar 96,49 %.

Tingkat kelulusan UN jenjang MTs pada tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun pelajaran 2005/2006, mencapai 92,9 %. Sementara tahun pelajaran 2007/2008 mencapai 94,9 %. Sedangkan pada jenjang MA, tingkat lulusan dalam UN pada tahun pelajaran 2005/2006 mencapai 91,28%, sementara tahun pelajaran 2007/2008 terjadi penurunan menjadi 89,26%.

Ujian nasional diakui oleh masyarakat sebagai salah satu pengendali mutu madrasah. Hal ini tercermin pada penelitian tahun 2007 tentang persepsi dan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan UN. Namun masyarakat juga mengharapkan Departemen Agama mampu melaksanakan

⁶ Sumarni. 2009. *Implementasi KTSP di Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, h. 45.

⁷ *Ibid.*

Ujian Nasional mata pelajaran Agama pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.⁸

6. *Tenaga Pengawas*

Penelitian tahun 2009 yang melibatkan pengawas di 16 kabupaten pada 6 provinsi menegaskan bahwa 88 % pengawas berkualifikasi S1 dan 12 % berkualifikasi S2. Dari aspek kepemilikan sertifikat, 75 % pengawas belum mempunyai sertifikat guru, bahkan 88 % pengawas belum mempunyai sertifikasi sebagai kepala. Ini menunjukkan bahwa secara umum, pengawas belum memenuhi standar SNP dan skor prosentase hanya mencapai 19 %.⁹

C. Penguatan Manajemen dan Tata Kelola

Sebagian besar madrasah dikelola oleh masyarakat di bawah yayasan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang belum memadai. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk Komite Madrasah perlu ditingkatkan sehingga dapat membantu proses penyelenggaraan pendidikan, selain kerjasama antar *stakeholders* yang harus terus ditingkatkan.

1. *Pengelolaan*

Secara umum penyelenggaraan madrasah dengan Manajemen Berbasis Madrasah (*Madrasah Based Management*) belum berjalan efektif di MTs. Ini disebabkan karena masih dominannya peran yayasan dan rendahnya kompetensi manajerial Kepala MTs. Pengelolaan SDM dan administrasi juga belum memadai.

Pada jenjang MA, madrasah dikelola tidak berdasarkan manajemen yang baik, melainkan dengan sistem tradisional yang mengabaikan aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas. Hal ini karena sebagian besar MA berstatus swasta dan dikelola oleh yayasan atau keluarga. Karena itu, upaya monitoring harus ditingkatkan sehingga MA dapat dikelola secara profesional.

⁸ Nurudin. 2007. *Persepsi dan Aspirasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan UN*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, h. 65.

⁹ Lisa'diyah. 2009. *Efektifitas KKG/IMGMP dalam Meningkatkan Kompetensi Mengajar Guru Mata Pelajaran Umum di Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, h. 98.

2. Peran Yayasan dan Komite

Survei tahun 2006 dengan melibatkan 256 madrasah di 14 provinsi menegaskan bahwa yayasan mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan madrasah. 74,2 % madrasah memiliki yayasan yang berperan seimbang dengan kepala madrasah, bahkan pada 16,4 % madrasah, peran yayasannya lebih dominan. Sebaliknya, 9,4 % madrasah, yayasannya tidak berperan. Sedangkan untuk Komite madrasah, 80 % dalam kategori ada dan aktif. Selebihnya, sebanyak 18,4 % komite madrasah ada tetapi tidak aktif. Sementara 1,6 % madrasah dalam kategori tidak memiliki komite madrasah.¹⁰

3. Kepemimpinan

Kualitas madrasah, antara lain tergantung kepada kepala madrasah. Kepala madrasah memegang peranan paling penting dalam memajukan madrasah. Jika madrasah dipimpin oleh seorang kepala yang kompeten dan profesional, niscaya madrasah akan maju. Sebaliknya, jika kepala madrasah tidak berkualitas atau tidak kompeten dan profesional, maka madrasah tidak akan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Kekurangan madrasah saat ini, di antaranya karena persoalan kualitas kepala madrasah yang rata-rata berada di bawah kepala sekolah, baik dalam persoalan manajemen maupun kurikulum.

Hasil survei tahun 2006 menegaskan bahwa kepala madrasah baik MI maupun MTs yang mempunyai latar belakang pendidikan S2 hanya 9%. Umumnya lulus S1 (56,6%), bahkan ada yang belum sarjana (34,4%). Kepala madrasah yang belum sarjana pada jenjang MTs sebanyak 24,4 %, sedang pada jenjang MI sebanyak 43,6 %. Umumnya, kepala madrasah belum memiliki kesadaran terhadap perencanaan pendidikan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Madrasah yang memiliki perencanaan jangka pendek 1 tahunan, sekitar 75 %, sedangkan yang memiliki perencanaan jangka menengah 3 tahun atau jangka panjang 5 tahun hanya 50 %.¹¹

¹⁰ Sumarni. 2006. *Survey Mutu Lulusan Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, h. 46.

¹¹ Moh. Murtadho. 2006. *Tipologi Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, h. 98.

III. PENGEMBANGAN KARAKTERISTIK MADRASAH

Madrasah sejak mulai dikenal di kalangan masyarakat muslim Indonesia telah menjadikan lembaga pendidikan ini tumbuh dengan karakteristik yang membedakan dirinya dari sekolah. Motivasi utama pembentukan madrasah lebih diwarnai oleh kebutuhan memenuhi kewajiban menuntut ilmu – khususnya ilmu agama, daripada penyiapan tenaga terampil pada bidang-bidang kerja tertentu. Secara spesifik madrasah dibangun oleh masyarakat sebagai wujud kesadaran keberagaman masyarakat terhadap pentingnya pemahaman sekaligus pelestarian ajaran agama (*tafaqquh fid-din*).

Jati diri madrasah tidak semata-mata sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga mencakup jati diri Islam dan jati diri umat Islam. Masyarakat muslim berupaya melaksanakan pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi religiusitasnya, dan Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang harus diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan.¹²

Perkembangan madrasah yang paling mutakhir dan signifikan adalah pasca *UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* yang mengangkat derajat madrasah dari label “*second class*” dalam persepsi banyak orang, menjadi sama atau sederajat dengan sekolah, minimal secara legal formalistik.

Masyarakat pada kenyataannya terbelah dalam dua kutub. Pertama, memahami modernisasi madrasah melalui UU sebagai kooptasi Pemerintah atas otoritas masyarakat yang ujung-ujungnya tidak saja merugikan madrasah bahkan justru menghilangkan sama sekali kepentingan umat Islam. Kedua, memahami bahwa madrasah justru harus terus dimodernisasi agar tetap *survive* dan mampu menjalin komunikasi secara cerdas dengan tuntutan masa depan. Caranya, madrasah didesain secara terstruktur dengan tidak hanya berkuat pada mata pelajaran agama, tetapi juga mendalami matapelajaran umum dengan baik.

Penelitian tahun 2007 tentang “Posisi Madrasah dalam Pandangan Masyarakat,” menegaskan bahwa masyarakat memberikan respons yang sangat tinggi terhadap pentingnya jati diri madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Masyarakat berkeinginan agar pengembangan madrasah tidak dilepaskan dari aspek kesejarahan madrasah itu sendiri.

¹² Nunu Ahmad An-Nahidl, dkk. 2007. *Posisi Madrasah dalam Pandangan Masyarakat*. Jakarta: Gaung Persada Press, h. 44.

Sebab jika itu dilakukan, hanya akan memperlebar ruang disparitas kebutuhan terhadap pendidikan antara Pemerintah dan masyarakat.

Masyarakat juga menilai bahwa sebagai pendidikan berbasis masyarakat, maka muatan pendidikan di madrasah idealnya adalah nilai kultural yang telah hidup dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena itu, kurikulum madrasah harus mengakomodir secara memadai materi ilmu-ilmu agama sebagai penjabaran dari visi, misi, dan tujuan diselenggarakannya madrasah. Independensi masyarakat juga harus dihargai oleh Pemerintah.¹³

Terkait dengan *UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* yang telah memposisikan madrasah menjadi sama atau sederajat dengan sekolah sebagai pendidikan umum (bab VI [17-18]), maka masyarakat berpandangan bahwa reposisi madrasah menjadi pendidikan umum tidaklah berarti harus menafikkan jati diri madrasah sebagai lembaga pendidikan islam. Reposisi madrasah menjadi tidak produktif ketika ilmu-ilmu ke-Islaman yang menjadi materi ajar di madrasah, disederhanakan menjadi Pendidikan Agama Islam dengan jumlah jam belajar yang sangat terbatas.¹⁴

IV. STRATEGI PENGEMBANGAN MADRASAH : CATATAN PENUTUP

Sebagai bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional, madrasah secara keseluruhan tidak bisa mengisolasi diri dari perubahan-perubahan paradigma, konsep, visi dan orientasi baru pengembangan pendidikan nasional. Pengembangan madrasah harus bergerak cepat, seiring tataran konsep maupun paradigma pendidikan nasional itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sebenarnya pengembangan madrasah sudah harus mempertimbangkan kondisi sosial, politik dan ekonomi global.

Ini dapat dipahami mengingat ke depan, keadaan masyarakat dipastikan akan semakin bebas dalam persaingan prestasi. Pasar bebas menjadi ciri utama masyarakat majemuk, terbuka dan maju. Di antara kecenderungan yang paling menonjol adalah tuntutan mekanisme pasar yang semakin beriringan dengan proses modernisasi dan industrialisasi

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Loc. cit*

sehingga pendidikan sering diidentikkan dengan pembangunan sumber daya manusia yang siap terjun ke dalam sistem pasar.

Dalam kondisi demikian, madrasah dituntut lebih dari sekedar menjalankan peran yang selama ini sudah dialamatkan kepadanya. Persaingan bebas menuntut madrasah dapat memberikan andil bagi pemenuhan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Tegasnya, madrasah harus dapat melayani kebutuhan pendidikan yang lebih beragam bagi lebih banyak orang dengan muatan pendidikan (*contents*), metode dan pola penyampaian pembelajaran yang merelevansi jenis dan bentuk-bentuk baru yang berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas.

Artinya, mencitrakan diri sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan kompetitif menjadi sangat penting bagi madrasah, khususnya dalam kerangka mensikapi kebijakan Pemerintah tentang otonomi pendidikan seiring penerapan konsep otonomi daerah. Dalam hal ini madrasah diberikan kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan dan mengelola madrasah dalam setiap komponennya, misalnya, pada aspek manajemen, penggalan sumber dana bahkan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Dalam hal ini, tidak dapat dinafikan pentingnya madrasah membangun jaringan yang luas dengan berbagai pihak dalam rangka penguatan kelembagaan.

Untuk dapat memenuhi berbagai tuntutan itu, maka tidak dapat dihindari bahwa madrasah harus mampu menyelesaikan terlebih dahulu berbagai persoalan-persoalan klasik yang menggelayuti proses pendidikannya, seperti rendahnya kualitas SDM, minimnya sarana prasarana, terbatasnya dana serta manajemen tradisional yang selama ini dikembangkan. Hal ini menjadi niscaya dilakukan, mengingat membangun citra sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas, maka madrasah harus *clear* dari berbagai persoalan internal kependidikan.

Menjadi penting pula peran kehumasan atau *public relation* dari madrasah untuk membangun citra berkualitas di tengah masyarakat luas. Komunikasi yang efektif dengan seluruh *stakeholders* madrasah mutlak diperlukan untuk menginformasikan sisi-sisi penting madrasah sehingga dapat menginisiasi pula kerjasama yang produktif dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung agenda peningkatan mutu dan kualitas madrasah itu sendiri.

SUMBER BACAAN

- Departemen Agama RI (2008): Data EMIS, Jakarta.
- Lisa'diyah (2006): *Survey Tingkat Drop Out Pendidikan Dasar di Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- _____ (2009): *Efektifitas KKG/MGMP dalam Meningkatkan Kompetensi Mengajar Guru Mata Pelajaran Umum di Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Badan Litbang dan Diklat (2009): *Workshop Pengembangan Madrasah pada Daerah Marjinal*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Sumarni (2006): *Survey Mutu Lulusan Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- _____ (2007): *Pemetaan Kompetensi Guru Mata Pelajaran Umum di Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- _____ (2009) *Implementasi KTSP di Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Nurudin (2007): *Persepsi dan Aspirasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan UN*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- An-Nahidl, Nunu Ahmad, dkk (2007): *Posisi Madrasah dalam Pandangan Masyarakat*. Jakarta, Gaung Persada Press.
- Murtadho, Moh, dkk (2006:): *Tipologi Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- Sumarni (2007): *Survey Mutu Lulusan Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan